

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia dengan populasi jumlah penduduk terpadat keempat di dunia, mengalami lonjakan pertumbuhan penduduk yang signifikan. Ditunjukkan dengan adanya penambahan swadaya fasilitas penunjang seperti meningkatnya jumlah permukiman dan kompleks perumahan, bertambahnya jumlah pusat perbelanjaan dan area komersial serta berkembangnya kawasan industri dan pabrik. Saat ini, jumlah penduduk mencapai 268,074,600 jiwa dan diprediksi terus meningkat hingga 305,7 juta jiwa di tahun 2035. Fenomena ini membawa dampak besar, termasuk dalam aspek ekonomi, industri, dan pengelolaan sampah. Lonjakan populasi di Indonesia, dengan laju pertumbuhan 1,31% per tahun (BPS, 2019), tentu akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan juga. Pada tahun 2020, jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 67,8 juta ton per tahun, dengan sebagian besar berasal dari rumah tangga, pasar, dan kawasan industri. Sampah akan menjadi masalah apabila tidak dikelola dengan baik dalam hal penanganan dan pengelolaannya. Ketidakmampuan dalam menangani sampah secara efektif akan melahirkan berbagai permasalahan kompleks.

Permasalahan sampah ini kerap menjadi salah satu isu utama dalam Pemerintah Daerah. Sampah merupakan masalah untuk sebuah daerah, jika dilihat dari banyaknya jumlah timbunan sampah yang tidak terangkut. Pemerintah Daerah dituntut untuk mengatasi masalah sampah tersebut dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah hendaknya mencermati kebijakan pengelolaan sampah, sebab dalam penanganan dan pengelolaan sampah Pemerintah harus menganggarkan biaya yang tentunya tidak sedikit. Semakin tingginya penghasilan penduduk daerah tersebut, maka akan semakin tinggi biaya pengelolaan sampah. Oleh sebab itu, Pemerintah wajib memberikan perhatian terhadap permasalahan penanganan dan pengelolaan sampah agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Adapun kebijakan terkait sampah, Pemerintah telah mengaturnya di dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di mana semula bertumpu pada pendekatan akhir pengelolaan sampah yang meliputi pengumpulan sampah, pengangkutan sampah dan pembuangan sampah ke tempat pemrosesan akhir dan sekarang bergeser pada paradigma baru yaitu pengelolaan sampah yang dilakukan dari aktivitas pengurangan sampah dan penanganan sampah yang benar dan baik. Aktivitas penanganan sampah yaitu berupa pengumpulan, pemilihan kembali, dan pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir, sedangkan aktivitas pengurangan sampah yaitu berupa pembatasan sampah, pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah.

Konsep pengelolaan sampah menyatakan bahwa peningkatan produksi sampah terjadi terus menerus sejalan dengan adanya pertambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk akan menyebabkan keberagaman kebutuhan, yang mana hal tersebut sejalan dengan jumlah buangan sisa dari aktivitas yaitu sampah. Selain itu, adanya perubahan pola konsumsi, gaya hidup, dan paradigma masyarakat merupakan masalah yang terkait dengan peningkatan produksi sampah. Oleh sebab itu, permasalahan sampah merupakan masalah

kompleks dan rumit yang dihadapi oleh seluruh negara, tak terkecuali dengan Negara Indonesia. Adanya ketidakseimbangan antara sampah yang dihasilkan dengan pengangkutan sampah, menjadikan permasalahan menjadi semakin kompleks. Maka dari itu, pengelolaan sampah yang tepat adalah kunci untuk mewujudkan negara yang bersih dan sehat.

Dijelaskan dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 11, bahwa pelayanan pengelolaan sampah yang dilakukan secara baik dan dengan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemda atau pihak ketiga berhak didapatkan oleh setiap orang. Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kebersihan khususnya penanganan dan pengelolaan sampah. Permasalahan sampah yang terjadi saat ini dilihat sebagai tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Dengan adanya biaya retribusi sampah yang diminta, masyarakat dianggap sebagai pihak penerima pelayanan. Selain berkaitan dengan teknis terhadap pengelolaan sampah, dibutuhkan juga partisipasi aktif dari masyarakat untuk membantu program Pemerintah Daerah dalam hal penanganan dan pengelolaan sampah.

Kabupaten Karawang, sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan populasi yang pesat, juga mengalami peningkatan produksi sampah setiap tahunnya. Sistem pengelolaan sampah di Karawang masih menggunakan metode tradisional, di mana sampah dikumpulkan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kemudian diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih bersifat *open dumping*. Model pengelolaan ini memiliki banyak keterbatasan, seperti

kebutuhan akan lahan yang luas serta armada pengangkut sampah yang memadai, yang kerap menjadi hambatan dalam pengelolaan yang optimal.

Menurut Rencana Kerja DLH Kabupaten Karawang Tahun 2024, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pengelolaan sampah di wilayah Karawang belum optimal. Dari segi sarana prasarana, faktor-faktor tersebut meliputi adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas armada pengangkut sampah. Armada yang tidak memadai ini akan menghambat proses pengumpulan dan pengangkutan sampah secara efektif. Selain itu, masih rendahnya jumlah fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Setempat (TPSS). TPSS yang terbatas menyebabkan penumpukan sampah di berbagai tempat. Faktor lainnya yaitu keterlibatan jumlah dan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang belum optimal. TPA yang tidak memadai dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan. Kondisi TPA yang masih bersifat open dumping tidak ramah lingkungan dan berpotensi menimbulkan pencemaran.

Faktor lain yang menyebabkan keterbatasan dalam memberikan pelayanan optimal yaitu masih kurangnya tenaga petugas kebersihan dan pengupahan yang belum memadai. Pengupahan yang belum memadai ini dapat menjadi penyebab masih kurangnya petugas kebersihan. Pengupahan yang belum memadai juga akan menyebabkan petugas kebersihan tidak semangat dalam melakukan pengangkutan sampah. Selain itu, masih ada beberapa petugas kebersihan yang belum memiliki keahlian dalam pengelolaan sampah terlihat dari masih kurangnya pemisahan antara sampah organik dan non organik.

Di luar aspek teknis, kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aoyagi et al., (2015), di beberapa negara maju seperti Jepang, peran serta masyarakat dalam memilah sampah di sumbernya menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan sistem pengelolaan sampah. Masyarakat di Jepang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk memilah sampah organik, non-organik, dan daur ulang, sehingga mempermudah proses pengelolaan sampah secara keseluruhan. Sebaliknya, di Kabupaten Karawang, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilahan sampah dan partisipasi dalam pengelolaan sampah masih menjadi tantangan utama. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, sehingga menambah beban bagi sistem pengelolaan sampah yang sudah terbatas.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang membutuhkan reformasi besar, baik dari segi teknis maupun sosial. Melalui penelitian ini, ingin diketahui lebih lanjut terkait kualitas pelayanan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang agar dapat mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kualitas pelayanan pengelolaan sampah, sebab pemerintah daerah sangat penting dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pengelolaan sampah.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan, hal tersebut mendasari dan melatarbelakangi peneliti untuk lebih lanjut meneliti tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang dengan judul penelitian **“Kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil kajian data yang sudah diperoleh, maka fokus penelitian ini yaitu

1. Mendeskripsikan dan mengetahui apakah kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Karawang dalam pengelolaan sampah ini sudah sesuai harapan atau tidak, dilihat dari dimensi bukti fisik (*tangible*), daya tanggap (*responsiveness*), keandalan (*reliability*), empati (*empathy*), dan jaminan (*assurance*)
2. Mendeskripsikan hambatan yang terjadi dalam kualitas pelayanan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Karawang

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang?
2. Apa saja yang menjadi penghambat dalam Kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini yaitu untuk

1. Untuk menganalisis kualitas pelayanan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang

2. Untuk melihat faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam kualitas pelayanan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan juga bersifat praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah dan memperluas pemahaman bidang administrasi publik terutama tentang kualitas pelayanan. Selain itu, bisa juga sebagai gambaran atau tambahan informasi bagi pembaca. Diharapkan juga bermanfaat untuk memperkaya teori-teori yang sudah ada dan mendorong penelitian selanjutnya yang lebih mendalam

2. Manfaat Praktis:

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan wawasan bahan pemikiran bagi pihak yang berkaitan, terutama yang menyangkut dengan kualitas pelayanan publik